

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA SOSIAL

Nurfadiah¹, Nurussakinah², Auzai Fazroh Siregar³, Marzuki Manurung⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

nurfadiahjawa@gmail.com¹, nurussakinah4728@gmail.com²,
auzaifazrohsiregar@gmail.com³, marzuki1100000173@uinsu.ac.id⁴

ABSTRACT; *Pancasila, as the basis of the state and way of life of the Indonesian nation, plays a very important role in building social ethics in society. This research aims to explore the application of Pancasila values in everyday life and understand their relevance in creating harmonious social relations. The research results show that each of the Pancasila principles contains a social ethical dimension that contributes to the formation of a tolerant, just and prosperous society. The Principles of Belief in One Almighty God, for example, emphasizes the importance of tolerance between religious believers. On the other hand, the principle of Just and Civilized Humanity invites us to respect justice and human rights. The principle of Indonesian Unity serves to strengthen a sense of solidarity and avoid discriminatory actions, while the principle of Democracy Led by Wisdom encourages active participation in democratic decision making. Ultimately, the principle of Social Justice for All Indonesian People demands reducing social disparities and increasing collective prosperity. However, this research also identified several challenges in implementing Pancasila, including the problem of corruption, the erosion of local values due to globalization, and the young generation's low awareness of the values of Pancasila itself. As a solution, a Pancasila-based character education approach, increasing collective awareness, and the use of technology to support the spread of these values are proposed. This research reaffirms the importance of Pancasila as a foundation for national and state life.*

Keywords: *Pancasila, Foundation of Social Ethics, Social Justice, Application of Values, Indonesian Society, Corruption, Social Harmony.*

ABSTRAK; Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memegang peranan yang sangat penting dalam membangun etika sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta memahami relevansinya dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila mengandung dimensi etika sosial yang berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang toleran, adil, dan sejahtera. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menekankan

pentingnya toleransi antarumat beragama. Di sisi lain, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajak kita untuk menghormati keadilan dan hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia berfungsi untuk memperkuat rasa solidaritas serta menghindari tindakan diskriminatif, sedangkan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Pada akhirnya, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila, termasuk masalah korupsi, pengikisan nilai-nilai lokal akibat globalisasi, dan rendahnya kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai solusi, diusulkan pendekatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, peningkatan kesadaran kolektif, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyebaran nilai-nilai tersebut. Penelitian ini menegaskan kembali pentingnya Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, Landasan Etika Sosial, Keadilan Sosial, Penerapan Nilai, Masyarakat Indonesia, Korupsi, Harmoni Sosial.

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi rakyat Indonesia, merupakan pijakan fundamental yang mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai kumpulan nilai-nilai mulia yang bersumber dari kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah bangsa, Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang penting dalam membangun hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Lima nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi dasar moral yang mendukung terwujudnya kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab.

Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar etika sosial kian meningkat. Globalisasi, individualisme, dan modernisasi seringkali memicu perubahan pada nilai-nilai sosial, yang dapat mengancam harmoni dalam masyarakat. Isu-isu seperti konflik sosial, kesenjangan ekonomi, dan menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila memerlukan perhatian yang serius. Oleh karena itu, penting untuk terus menguatkan Pancasila sebagai landasan etika sosial agar tetap berfungsi sebagai panduan moral yang efektif dalam menghadapi beragam tantangan yang ada.

Penelitian mengenai Pancasila sebagai landasan etika sosial bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memahami peran Pancasila dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam proses penerapannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang relevan untuk memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman moral dan etika sosial, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk menganalisis implementasi setiap sila dalam Pancasila melalui tindakan konkret. Hal ini mencakup interaksi antarindividu, proses pengambilan keputusan secara kolektif, dan penyusunan kebijakan publik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila, demi terciptanya masyarakat yang toleran, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga menjadi nilai yang hidup dan terwujud dalam perilaku serta budaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi realitas sosial melalui pengalaman, perspektif, dan perilaku individu maupun kelompok. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut bertujuan menggambarkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan toleransi, yang berfungsi sebagai pedoman etika sosial dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif deskriptif diambil untuk menggali penerapan Pancasila sebagai landasan etika sosial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pola interaksi antarindividu hingga kebijakan pemerintah. Data yang dikumpulkan akan menjadi fondasi dalam merekomendasikan kebijakan atau langkah strategis guna memperkuat etika sosial yang berpijak pada Pancasila di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika Sosial dalam Pancasila

Dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia, berbagai gesekan di ruang publik sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan yang ada. Secara umum, dua pandangan utama

dapat terlihat, yaitu superioritas dan inferioritas. Jika pandangan ini terus dipelihara, konflik di dalam masyarakat pun akan sulit dihindari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pentingnya etika sosial (Arifin dkk., 2017). Etika sosial berfungsi sebagai jembatan penghubung antarberbagai kelompok masyarakat, memungkinkan terbentuknya komunitas yang harmonis. Dengan adanya jembatan ini, konsep "yang lain" dan "kita" dapat menyatu dalam semangat kemanusiaan. Selain itu, meskipun manusia memiliki ikatan yang kuat dengan kerangka keagamaan masing-masing, penerapan etika sosial dapat mencegah terjadinya diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bersama dalam masyarakat, di mana setiap individu dipandang sebagai manusia dengan hak yang setara.

Etika sosial dalam ruang publik perlu diterapkan dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan proses pembentukan individu. Pertama, penguatan kecerdasan sosial individu dapat dicapai melalui kesadaran akan keberagaman yang ada di sekitar kita. Kedua, pendidikan, baik di lingkungan formal maupun dalam konteks keagamaan, harus bersikap terbuka terhadap pluralitas. Ketiga, jurnalisme yang menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman juga merupakan faktor yang sangat krusial (Noor, 2015, hlm. 20–22). Dengan demikian, keberadaan negara sebagai wadah bagi masyarakat yang beragam akan terus terjaga dalam upaya membina warganya. Hal ini secara langsung akan mendorong kesatuan masyarakat dalam membangun semangat untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu negara, terutama pada era globalisasi saat ini.

Seiring dengan perkembangan interaksi sosial manusia di ruang publik saat ini, muncul pula ruang publik yang baru. Ruang baru ini membawa berbagai risiko terkait penyelewengan sosial, terutama dalam hal etika dan tanggung jawab individu. Berbeda dengan masa lalu, di mana interaksi hanya terjadi di ruang nyata, saat ini interaksi juga berlangsung di ruang maya. Transformasi ini merupakan dampak dari modernitas, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan yang mendorong lahirnya teknologi (Nasution, 2019).

Agama, dengan konsep moralnya, memberikan panduan yang menginspirasi para penganutnya untuk menerapkan etika dalam ruang publik. Di sisi lain, media dengan beragam informasi yang dimilikinya dapat menantang berbagai pandangan dan membentuk perspektif baru dalam diri manusia. Oleh karena itu, penting adanya keselarasan antara agama dan media, beserta semua instrumennya, untuk menanamkan nilai-nilai etika demi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Peran negara juga sangat krusial dalam

menyediakan dan mengkampanyekan etika di ruang publik. Tentu saja, keberhasilan ini memerlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, hubungan antarpemeluk agama, budaya, ras, dan suku yang berbeda dapat terjalin secara harmonis.

Dalam konteks Pancasila, etika sosial berperan sebagai landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis dengan nilai-nilai Pancasila. Etika sosial yang terkandung dalam Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Etika sosial yang berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama, serta mendorong individu untuk menjalankan ajaran agama mereka dengan benar. Dengan cara ini, masyarakat dapat mencapai keharmonisan dan mengembangkan integritas moral yang kokoh.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menekankan betapa pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Etika sosial yang terkandung di dalamnya mencakup sikap saling menghormati, toleransi, dan keadilan di berbagai bidang kehidupan, baik hukum, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, setiap individu berhak mendapatkan hak-haknya secara adil dan dapat hidup dalam suasana yang damai dan harmonis.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Etika sosial memainkan peranan penting dalam memupuk semangat persatuan, dengan mengedepankan kerjasama, solidaritas, serta menghindari segala bentuk diskriminasi atau perpecahan yang dapat mengancam keharmonisan sosial. Melalui persatuan, masyarakat dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dan mendorong kemajuan bangsa.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menggarisbawahi pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam pelaksanaannya, etika sosial mengajarkan nilai partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, sila ini juga menghargai pendapat orang lain demi mencapai kebaikan bersama. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan menjadi cerminan konsensus yang mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila terakhir ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesempatan hidup. Dalam konteks ini, etika sosial diartikan sebagai upaya untuk mempromosikan kesejahteraan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak-haknya secara adil. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki peluang yang setara untuk berkembang.

B. Pancasila dan Masalah Korupsi

Menurut Saputra (2017), Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia. Namun, keberadaannya tidak terjadi secara instan; Pancasila lahir melalui sebuah proses panjang dan penuh pertimbangan. Dalam perumusan Pancasila, terjadi perdebatan sengit di antara para perumus, yang sangat berhati-hati dalam menentukan dasar negara, demi menciptakan fondasi yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah melewati diskusi yang mendalam, akhirnya terwujudlah konsep Pancasila yang agung dengan cita-cita mulia. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bisa dipandang sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara kita, yaitu Pancasila (Saputra, 2017).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya iman dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saat ini, kita menyadari bahwa di Indonesia terdapat enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Setiap ajaran dari agama-agama tersebut secara tegas menentang praktik korupsi (Dina, 2019).

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan nilai-nilai mendasar yang sering diabaikan dalam kasus-kasus korupsi. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa tindakan korupsi mengkhianati prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, tenggang rasa, dan saling mencintai. Seorang koruptor sejatinya sangat bertentangan dengan semangat keadilan; ia merampas hak orang lain untuk kepentingan pribadi, menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Persatuan Indonesia adalah suatu nilai yang harus dijunjung tinggi. Sayangnya, individu yang terlibat dalam korupsi sering kali mengabaikan semangat persatuan di antara sesama. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keinginan belaka, tanpa menyadari

bahwa tindakan korupsi dapat membawa dampak yang sangat merugikan. Korupsi tidak hanya merusak perekonomian, tetapi juga melemahkan sikap positif masyarakat dan mengikis rasa cinta terhadap bangsa dan negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007).

Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi dapat berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang berwenang, mengingat mereka telah mempercayakan demokrasi kepada wakil-wakil rakyat tersebut.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Sayangnya, nilai keadilan kian terabaikan, terutama di tengah peningkatan kasus korupsi yang melanda negara ini. Kurangnya dana untuk kepentingan publik mengakibatkan banyak proyek pembangunan terhambat. Bukannya digunakan untuk pembangunan, dana yang seharusnya bermanfaat tersebut justru terjebak di tangan para koruptor. Akibatnya, kemajuan pembangunan terhenti, dan peluang untuk mencapai keadilan pun sirna. Berbagai agenda tidak berjalan sesuai harapan, dan banyak proyek pembangunan terhenti di tengah jalan akibat minimnya dana.

Secara umum, penegakan hukum pidana memiliki perhatian utama pada pencegahan kejahatan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Fokus utama dari penegakan hukum ini adalah untuk mencegah tindakan kriminal sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kejahatan. Pencegahan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara instan; melainkan, memerlukan perencanaan yang rasional, yang tidak hanya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari bangsa, tetapi juga mencakup strategi perlindungan masyarakat yang komprehensif (Simanjuntak, 2020).

Dalam kerangka hukum pidana, langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui pendekatan preventif. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi, mengatasi, serta menanggulangi penyebab yang mendorong terjadinya korupsi. Penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal yang berkaitan dengan moralitas, di mana penurunan nilai-nilai moral dalam masyarakat Indonesia dapat membuat sebagian individu terjerumus dalam praktik korupsi. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berhubungan dengan pendapatan yang tidak mencukupi, yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia hidup di ambang batas ekonomi bahkan di bawahnya.

Jika diringkas, faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya

terhadap orang lain (Mustaghfirin, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi sangat mungkin dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memegang posisi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan mengembangkan strategi yang efektif guna mencegah terjadinya praktik korupsi yang semakin marak.

Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait. Pertama, pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk korupsi. Kedua, ia berupaya mengubah sikap dan pandangan masyarakat terhadap praktik korupsi. Ketiga, pendidikan ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan baru yang diperlukan untuk memberantas tindakan korupsi tersebut (Azmi, 2020).

C. Pancasila dalam Penegakan Keadilan Sosial

Pancasila, sebagai fondasi negara dan panduan hidup bagi bangsa Indonesia, menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai salah satu prinsip yang mendasar. Hal ini terpancar jelas dalam sila kelima Pancasila, yang menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan kehidupan yang adil, merata, dan sejahtera bagi seluruh rakyat, tanpa memandang latar belakangnya. Penegakan keadilan sosial tidak hanya dilihat sebagai aspek hukum atau kebijakan pemerintah semata, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila, sebagai landasan negara dan pandangan hidup bangsa, memberikan dasar moral yang kokoh untuk menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mencerminkan komitmen bangsa dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam penerapannya, konsistensi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di seluruh aspek kehidupan dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjadi pijakan bagi kemajuan bangsa.

D. Implementasi Etika Pancasila dalam Keseharian

Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di berbagai aspek (Nurgiansah, 2021a). Hadi Rianto (2016) menyatakan bahwa Pancasila, sebagai ideologi negara, mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari setiap individu. Selain berfungsi sebagai sarana untuk membangun karakter yang baik, penerapan nilai

Pancasila juga memiliki peranan penting dalam pelestarian semangat kebangsaan, serta penanaman rasa cinta tanah air dan jiwa bela negara.

Dalam nilai-nilai Pancasila, terdapat berbagai aspek penting yang membentuk kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah ketaatan dalam beragama, cara menghargai dan memanusiakan sesama, serta menjalani hidup yang beradab dan beretika. Selain itu, nilai-nilai seperti kerjasama, gotong royong, toleransi, simpati, empati, serta sikap bijak dalam setiap tindakan juga sangat penting. Kemampuan untuk memimpin dengan adil pun menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai tersebut. Jika setiap warga negara dapat menerapkan seluruh aspek nilai Pancasila ini, Indonesia pasti akan mengalami kemajuan, mampu bersaing di era revolusi industri 4. 0, dan menciptakan generasi yang membangun bangsa yang beradab dan bertuhan.

Ismail (2019) menjelaskan bahwa Revolusi Industri 4. 0 di Indonesia akan mendorong sepuluh prioritas nasional dalam inisiatif "Making Indonesia 4. 0" yang bersifat lintas sektoral. Kesepuluh prioritas tersebut meliputi: (1) Perbaikan alur aliran barang dan material, (2) Desain ulang zona industri, (3) Pengakomodasian standar-standar berkelanjutan, (4) Pemberdayaan UMKM, (5) Pembangunan infrastruktur digital nasional, (6) Penarikan minat investasi asing, (7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, (8) Pembangunan ekosistem inovasi, (9) Penyediaan insentif untuk investasi teknologi, dan (10) Harmonisasi aturan kebijakan (Kementerian Peran, 2019: 6-7). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan semua prioritas nasional ini dapat direalisasikan dan terlaksana dengan efektif.

Di era globalisasi yang kita jalani saat ini, akses informasi menjadi sangat mudah. Berita dan informasi terbaru yang kita inginkan dapat diakses dalam hitungan detik hanya dengan beberapa kali sentuhan pada perangkat kita. Selama pencarian informasi itu, sering kali kita dihadapkan pada beragam informasi baru yang membangkitkan rasa ingin tahu. Hal ini mendorong kita untuk terus mendalami dan mencari tahu lebih lanjut. Tanpa disadari, apa yang kita eksplorasi tersebut mulai terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita.

Namun, situasi ini sering kali mengarah pada penerapan ide-ide yang mungkin keliru atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar diperlukan, terutama dari calon pendidik masa depan. Sikap dan kebiasaan yang diadopsi dari negara lain oleh generasi muda dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka, sehingga kebiasaan asing ini perlahan dianggap sebagai hal yang wajar. Akibatnya, generasi muda

berisiko melupakan dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang telah ditanamkan oleh pendidik sebelumnya.

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pembangunan suatu bangsa (Nurgiansah, 2021b). Oleh karena itu, kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan karakter bangsa perlu ditanamkan dan diingatkan kepada mereka. Generasi muda adalah cerminan dari identitas suatu bangsa. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi mereka tentang betapa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Selain itu, sebagai calon pendidik, kita juga harus memberikan pemahaman tentang signifikansi Pancasila dalam membentuk karakter generasi penerus.

Meskipun tidak ada yang salah dengan hobi generasi muda yang menikmati budaya asing, kita harus tetap ingat bahwa kecintaan terhadap budaya luar tidak boleh menggeser rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Lebih jauh lagi, budaya dan kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang di tanah air kita seharusnya tetap menjadi prioritas utama.

Mengutip pernyataan Sukayasa (2019) yang merujuk pada Megawangi (2008), terdapat sembilan nilai karakter Pancasila yang sepatutnya diajarkan kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) Cinta kepada Tuhan dan kebenaran, yang mencakup kasih kepada Allah, kepercayaan, penghormatan, dan kesetiaan; (2) Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, yang tercermin dalam sikap bertanggung jawab, keunggulan, ketahanan, disiplin, dan keteraturan; (3) Amanah, yang berhubungan dengan kepercayaan, keberandalan, dan kejujuran; (4) Hormat dan santun, yang mengedepankan rasa hormat, kesopanan, dan ketaatan; (5) Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, yang mencakup cinta, empati, keseimbangan, dan semangat gotong royong; (6) Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, yang ditandai dengan keyakinan, keberanian, daya cipta, serta semangat juang; (7) Keadilan dan kepemimpinan, yang mencerminkan rasa adil, welas asih, dan kemampuan memimpin; (8) Kebaikan dan kerendahan hati, yang terwujud dalam sikap ramah, baik hati, dan rendah hati; serta (9) Toleransi dan cinta damai, yang meliputi penerimaan, fleksibilitas, kedamaian, dan persatuan. Melalui penanaman sembilan nilai karakter Pancasila ini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang memiliki karakter yang kuat dan akhlak mulia.

Generasi muda memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu negara di masa depan. Mereka memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan bangsa. Dalam

upaya menciptakan perubahan, generasi muda dapat mengambil berbagai langkah, seperti menerapkan pemikiran kritis dan menciptakan inovasi baru yang mencerminkan budaya Indonesia dengan memanfaatkan media sosial dan internet. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan arus informasi untuk memperkenalkan dan mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila melalui platform-platform tersebut. Generasi muda juga memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka dengan menjangkau anak-anak di daerah yang terbelakang melalui internet. Mengajar bukan hanya tanggung jawab guru; generasi muda, khususnya mahasiswa, perlu berperan sebagai agen perubahan yang aktif.

Yunita Triwardani (2013) mengungkapkan bahwa generasi muda perlu memanfaatkan kemampuan berpikir kritis mereka dengan memanfaatkan teknologi digital informasi yang semakin canggih. Hal ini penting untuk mempersiapkan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa generasi muda berperan sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan transformasi yang signifikan bagi negara. Jika perubahan ini dilakukan dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, maka hasil yang tercipta akan lebih baik dan memiliki arti yang mendalam bagi bangsa.

KESIMPULAN

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai mulia yang penting untuk membangun kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sebagai pedoman etika sosial, Pancasila memberikan arahan moral serta prinsip-prinsip universal yang esensial dalam menciptakan hubungan sosial yang adil, harmonis, dan beradab di tengah ragam budaya, agama, dan suku bangsa. Setiap sila dalam Pancasila membawa nilai-nilai yang mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghormati, toleran, dan bertanggung jawab:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menanamkan nilai religiusitas, integritas, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan sosial kita.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya menghormati martabat setiap individu, menjunjung persamaan hak, dan menegakkan keadilan.
3. Sila Persatuan Indonesia mendorong kesadaran kolektif akan makna pentingnya persatuan di tengah keragaman yang ada.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan perlunya musyawarah dan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan terciptanya kesejahteraan bersama yang merata, tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai landasan etika sosial, Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam masyarakat, seperti korupsi, kesenjangan, dan konflik. Pancasila juga menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat, sambil tetap menjaga persatuan dan harmoni sosial.

Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, oleh baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai landasan moral yang hidup dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. Fathari, F. Anggara, JW. Al Amin, MD. (2020). Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(1), 11- 18.
- Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab di Era Reformasi. *ASPIRASI: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27-36.
- Arliman, L. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 333-339.
- Azizan, N & Lubis, MA. (2018). Pengembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar Berbasis Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol 2 Tahun 2018*, hal 585 – 587.
- Abdullah, M. A. (1993). Keimanan Universal ditengah Pluralisme Budaya, tentang Klaim Kebenaran Agama, dan Masa Depan Agama. *Ulumul Qur'an*, IV (1), 88–96.
- Ali Ahmad, H. (Ed.). (2013). *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,.
- Anwar, S., Kudadiri, S., & Wijaya, C. (2019). Peran Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Aceh Tenggara sebagai Agents of Social Change. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan*

Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 4(2), 179–187.

<https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11950>

Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Azmi, S. R. M. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA KULIAH PKN BERBASIS PROJECT CITIZEN DI STMIK ROYAL KISARAN. *Journal of Science and Social Research*, 3(1), 64-72.

Badjuri, A. (2011). PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (The Role of Indonesian Corruption.

Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia. Kaelan & Zubaidi, Ahmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.